

LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

TAHUN 2021



Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu sarana Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sepanjang tahun 2021. Pencapaian terhadap sasaran kegiatan dalam Laporan kinerja tahun 2021 ini diharapkan mampu menggambarkan capaian Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dalam mendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak baik di internal maupun eksternal Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat atas segala dukungan dan kerja samanya sehingga seluruh kegiatan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Tahun Anggaran 2017 dapat terlaksana dengan baik.

Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat,



Arini Wijayanti, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
AKUNTABILITAS KINERJA	11
PENUTUP.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Biro Hukum dan Dumas) merupakan unit kerja dibawah koordinasi Deputi Bidang Administrasi yang menunjang kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) kepada DPR RI. Biro Hukum dan Dumas mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengelolaan pengaduan masyarakat dengan landasan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, Biro Hukum dan Dumas terdiri dari 3 (dua) unit kerja yaitu Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, dan Bagian Pengaduan Masyarakat.

Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI sebagai Bagian dari instansi Pemerintah diharapkan mampu memberikan hasil capaian kinerja yang optimal dan profesional, sehingga dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu syarat terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

Untuk tercapainya tujuan tersebut, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan baik dan berkesinambungan yang dimulai dari sistem perencanaan dan program kegiatan, perencanaan anggaran hingga kepada pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang harus dikelola dengan baik dan benar, serta mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, sehingga berorientasi akhir kepada hasil (*result oriented*).



Dalam rangka mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah termasuk Setjen DPR RI perlu menyusun suatu Rencana Strategis yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka menengah (5 tahun) dan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai Kontrak Kinerja serta pada akhirnya dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja pada setiap tahun berjalan.

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Dumas tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran sebagai bentuk kewajiban setiap instansi pemerintah yaitu berupa penggunaan seluruh sumber daya yang ada, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang terdapat di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang seluruhnya menggambarkan atau menjelaskan sejauh mana capaian kinerja yang dilakukan dalam satu tahun anggaran dengan mengacu kepada sasaran program kegiatan, indikator kinerja dan target yang ditetapkan, serta menjelaskan pula tingkat keberhasilan maupun kegagalan atas kinerja yang dicapai. Dengan demikian Laporan Kinerja selain dapat menjadi bahan evaluasi atas program yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran juga sebagai landasan atau pedoman dalam menyusun perencanaan kegiatan pada tahun tahun berikutnya.

Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja Biro Hukum dan Dumas ini selanjutnya akan disampaikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Biro Hukum dan Dumas untuk tahun anggaran 2021.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI SERTA ALOKASI ANGGARAN BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Struktur Organisasi

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Biro Hukum dan Dumas mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.

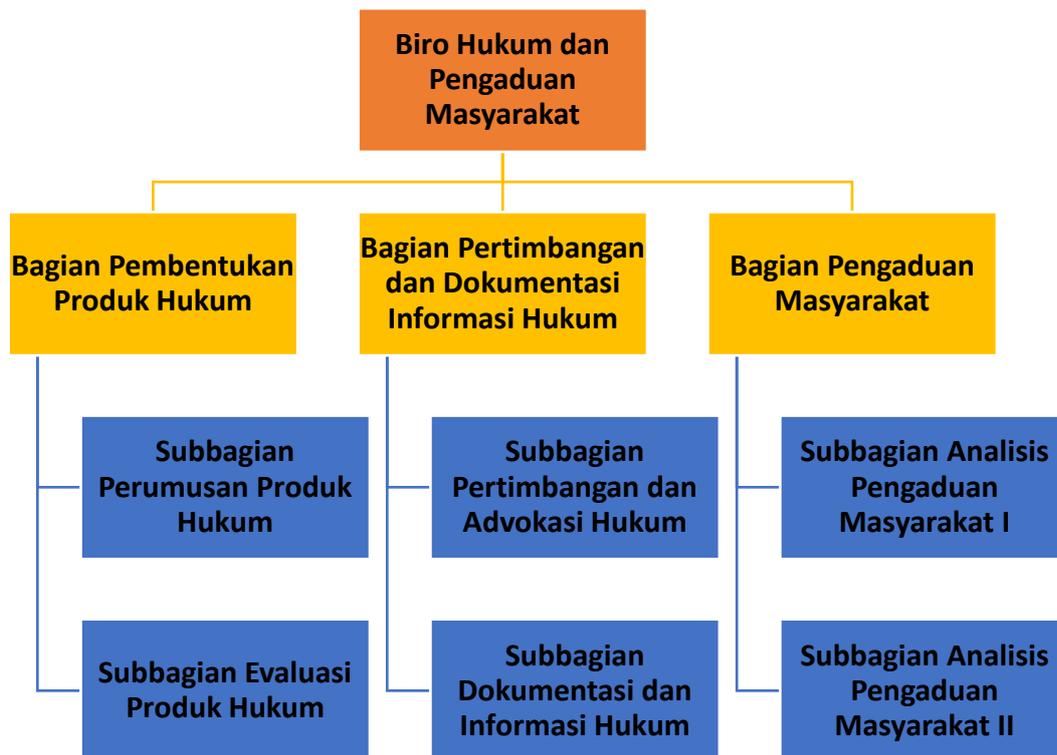
Pasal 184 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Biro Hukum dan Dumas terdiri atas tiga unit kerja yaitu :

- a. Bagian Pembentukan Produk Hukum;
- b. Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum;
- c. Bagian Pengaduan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Biro Hukum dan Dumas dapat disampaikan dibawah ini sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat



2. Komposisi Pegawai

Biro Hukum dan Dumas didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,. Berdasarkan data dari Bagian Kepegawaian sampai dengan Desember 2021 komposisi jumlah pegawai Biro Hukum dan Dumas mengalami perubahan dari tahun 2020 menjadi sebanyak 33 orang pegawai, terdiri dari pejabat struktural 10 (sepuluh) orang, 16 (enam belas) orang staf pelaksana, serta 7 (tujuh) orang PPN-ASN (Pegawai Pemerintah Non ASN). Secara keseluruhan jumlah 33 (tigapuluh tiga) pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Dumas sebagaimana Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Pegawai Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

No	Biro	Pejabat Struktural	Pelaksana	Pejabat Fungsional	PPN-ASN	Jumlah
1.	Biro Hukum	0	0	0	2	2
2.	Bagian PPH	3	4	0	2	9
3.	Bagian PDIH	3	4	0	2	9
4.	Bagian Pengaduan Masyarakat	3	8	0	1	12
	Jumlah	9	16	0	7	32

Sumber : Data Bagian Kepegawaian, Desember 2021

Adapun perubahan jumlah Pegawai di Biro Hukum dan Dumas tersebut disebabkan karena para Analis kebijakan yang merupakan Kelompok Jabatan Fungsional berjumlah 2 orang, yang semula berada di bawah Biro Hukum dan Dumas, tetapi berdasarkan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pasal 299 huruf d dan pasal 300 huruf b, kedudukannya saat ini berada di bawah Pusat Penelitian Setjen DPR RI.

3. Alokasi Anggaran

Selanjutnya, dari sisi dukungan anggaran untuk Biro Hukum dan Dumas, maka untuk alokasi anggaran pada tahun 2021 semula sebesar Rp. 4.949.470.000. (*Empat milyar sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*), terbagi dalam Satker Dewan semula sebesar Rp. 1.501.286.000,- (*Satu milyar lima ratus satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*), setelah direvisi menjadi sebesar Rp. 522.422.000,- (*Lima ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah*). Untuk Satker Setjen semula Rp. 3.448.184.000,- (*Tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*), setelah direvisi menjadi Rp. 2.763.180.000,- (*Dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah*).

Perbandingan dan penurunan alokasi anggaran di Biro Biro Hukum dan Dumas dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2
Persandingan Alokasi Anggaran Biro Hukum dan Dumas
Tahun 2021

No.	SATUAN KERJA	ALOKASI ANGGARAN			
		TAHUN 2020 <i>Sebelum revisi</i>	TAHUN 2020 <i>Setelah revisi</i>	TAHUN 2021 <i>Sebelum revisi</i>	TAHUN 2021 <i>Setelah revisi</i>
1.	Satker Dewan	1.495.336.000,- -	545.322.000,-	1.501.286.000,- -	522.422.000,-
2.	Satker Setjen	1.845,532,000,- -	1,390,517,000,- -	3.448.184.000,- -	2.763.180.000,- -
	JUMLAH	3,340,868,000,- -	1.935,839.000,- -	4.949.470.000,- -	3.285.602.000,- -

Sumber : Data Biro Keuangan, 2021.

Pandemi Covid 19 yang belum selesai menyebabkan instansi pemerintah perlu mengambil langkah efisiensi dalam melaksanakan kegiatan sehingga perlu optimalisasi anggaran. Pemerintah telah melakukan optimalisasi penggunaan APBN baik untuk Anggaran Dewan maupun anggaran Setjen, sehingga menyebabkan anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum dan Dumas beberapa kali mengalami revisi, yang berakibat pada makin mengecilnya jumlah alokasi anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum dan Dumas.

C. PERMASALAHAN STRATEGIS BIRO HUKUM DAN DUMAS

Permasalahan strategis yang dihadapi Biro Hukum dan Dumas pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan struktur organisasi menyebabkan terdapat jabatan-jabatan yang memiliki kekurangan jumlah sumber daya manusia yang menempati. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetensi sumber daya analis hukum dan analis pengaduan yang ada belum optimal.
2. Kurangnya pemahaman pegawai di lingkungan Setjen DPR RI terhadap pembentukan produk hukum, selain itu kemampuan koordinasi analis hukum dan analis pengaduan dengan stakeholder terkait belum optimal.
3. Penanganan perkara hukum (gugatan) kepada DPR RI ataupun Setjen DPR RI, yang ditangani oleh Biro Hukum dan Dumas, sangat tergantung dengan jumlah perkara hukum yang diterima oleh DPR RI dan Setjen DPR RI, termasuk lokasi dimana perkara hukum (gugatan) tersebut diajukan. Selain itu, penyelesaian atas perkara hukum tersebut sangat tergantung dengan penyelesaian di ranah peradilan yang setiap perkara berbeda-beda waktu penyelesaiannya.
4. Terintegrasinya sistem JDIH Setjen DPR RI dengan JDIHN yang dikelola oleh BPHN terhitung sejak tanggal 9 Juni 2021, menimbulkan konsekuensi untuk mempercepat pengembangan JDIH berupa inovasi fitur atau menu-menu baru yang dapat membantu para stakeholders atau pemangku kepentingan untuk mendapatkan layanan informasi dokumentasi dan informasi hukum yang lebih cepat, efisien dan optimal.
5. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan unit unit kerja terkait yang mengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Setjen DPR RI sehingga pemberian layanan informasi dan dokumen hukum dapat terintegrasi satu pintu melalui Website JDIH Setjen DPR RI dimana Biro Hukum dan Dumas dalam hal ini sebagai koordinator.
6. Pengembangan JDIH Setjen DPR RI yang telah terintegrasi dengan JDIHN saat ini tidak didukung oleh terpenuhinya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum.

- 
7. Tindak lanjut surat - surat pengaduan masyarakat yang telah dianalisa dan ditangani oleh Bagian Dumas belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), mengingat hal tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan Pimpinan dan AKD DPR RI.
 8. Penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan masyarakat masih terkendala pada sistem, sehingga pengelolaannya belum dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN DUMAS

Biro Hukum dan Dumas sebagai unit pimpinan pratama memiliki tujuan untuk mendukung visi, misi dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI yang tertuang dalam Persekjen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 18 Tahun 2021. Visi Setjen DPR RI adalah ***"Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"***.

Sedangkan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen Penetapan Kinerja (PK), maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai bagian dari capaian kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI telah menetapkan PK untuk Biro Hukum dan Dumas sesuai dengan indikator yang telah disempurnakan.

PK Biro Hukum dan Dumas yang disempurnakan merupakan sasaran program/kegiatan gabungan untuk satuan kerja Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. PK yang telah dilakukan revisi tersebut disampaikan secara keseluruhan yang merupakan satu sasaran program/kegiatan Biro Hukum dan Dumas dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dukungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	1. Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum 2. Persentase capaian pembentukan produk hukum 3. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti; 4. Persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	3,07 100 % 100 % 92 %

Atas dasar Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2021 tabel 2.1 diatas, maka ditetapkan sasaran program/kegiatan di Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, dan Bagian Dumas, sebagaimana pada Tabel 2.2 , Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bagian Pembentukan Produk Hukum Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya perumusan dan evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	a. Perumusan produk hukum; b. Evaluasi produk hukum; c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pembentukan Produk Hukum;	1 layanan 1 layanan 1 dokumen 1 dokumen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		d. Laporan Pertanggungjawaban Bagian Pembentukan Produk Hukum.	

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pemberian pertimbangan dan advokasi hukum serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	1. Pertimbangan dan advokasi hukum	1 dokumen
		2. Pengembangan JDIH	1 dokumen
		3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum	3 dokumen
		4. Laporan Pertanggungjawaban Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum	1 dokumen

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan ke DPR RI	1. Layanan pengaduan masyarakat;	2 layanan
		2. Rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengaduan Masyarakat	3 dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Setiap instansi pemerintah perlu melakukan pengukuran kinerja untuk membuktikan akuntabilitas kinerjanya. Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) / Indikator Kinerja Pokok (IKP) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2021.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan PK dengan realisasinya. Untuk seluruh sasaran program, indikator kinerja program, target, realisasi dan capaian Biro Hukum dan Dumas Tahun 2021 (3 sasaran program) dapat ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2021

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksananya perumusan dan evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.	a. Perumusan produk hukum;	1 layanan	1 layanan	100 %
b. Evaluasi produk hukum;		1 layanan	1 layanan	100 %	
c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pembentukan Produk Hukum;		1 dokumen	1 dokumen	100 %	
d. Laporan Pertanggungjawaban Bagian Pembentukan Produk Hukum.		1 dokumen	1 dokumen	100 %	
2	Terlaksananya pemberian pertimbangan dan advokasi hukum serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	1. Pertimbangan dan advokasi hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
2. Pengembangan JDIIH		1 dokumen	1 dokumen	100 %	
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum		3 dokumen	3 dokumen	100 %	
4. Laporan Pertanggungjawaban Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Terlaksananya kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan ke DPR RI	1. Layanan pengaduan masyarakat 2. Rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengaduan Masyarakat	2 layanan 3 dokumen	2 layanan 3 dokumen	100 % 100 %

Selain capaian yang merupakan target yang telah ditetapkan dalam sasaran program/kegiatan dalam Perjanjian Kinerja, Biro Hukum dan Dumas juga memperoleh penghargaan sepanjang tahun 2021. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh antara lain:

1. Peringkat Ketiga Unit Pengolah Arsip Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2021; dan
2. Penerima Penghargaan Anggota JDHIN Terbaik Kedua Tahun 2021.

Berkaitan dengan sasaran program/kegiatan Biro Hukum Dan Dumas dengan Indikator Kinerja yang salah satunya adalah indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum dengan target 3,07, maka berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan diperoleh nilai indeks sebesar **3,37 atau 84,37**. Terhadap nilai indeks tersebut, berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik termasuk dalam kategori **B (Baik)**. Dengan rincian aspek pelayanan yang menjadi objek survei, yakni sebagai berikut:

1. Survei terhadap Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dilakukan dengan menilai Dukungan Layanan Hukum dalam memenuhi kebutuhan layanan hukum sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja yang ada. Dari 204 responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 78 responden atau 38,2 persen dan menyatakan puas sebanyak 125 responden atau 61,3 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 1 responden atau 0,5 persen, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas.

2. Untuk Kepuasan Responden terhadap Pemberian Layanan Penyusunan Keputusan (SK) diberikan dengan mekanisme urutan waktu pengajuan/permohonan (first in first out) dari 204 responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 81 responden atau 39,7 persen dan menyatakan puas sebanyak 123 responden atau 60,3 persen. Tidak ada responden yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas;
3. Persyaratan Memperoleh Layanan Perumusan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dinilai sudah terpublikasi dengan baik dan mudah dipahami dan layanan perumusan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI yang disediakan memenuhi kebutuhan penerima layanan;
4. Persyaratan memperoleh layanan Penyusunan Keputusan (SK) dinilai sudah terpublikasi dengan baik dan mudah dipahami dan jenis layanan Penyusunan Keputusan (SK) yang disediakan memenuhi kebutuhan penerima layanan hukum.
5. Persyaratan memperoleh layanan Perumusan Nota Kesepahaman/*Memorandum Of Understanding* (MOU) dan Perjanjian dinilai sudah terpublikasi dengan baik dan mudah dipahami dan Jenis layanan Perumusan Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding (MOU) dan perjanjian yang disediakan memenuhi kebutuhan penerima layanan hukum;
6. Persyaratan memperoleh layanan Advokasi (bantuan hukum) dinilai sudah terpublikasi dengan baik dan mudah dipahami serta jenis layanan Advokasi (Bantuan Hukum) yang disediakan memenuhi kebutuhan penerima layanan hukum;
7. Persyaratan memperoleh layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum dinilai sudah terpublikasi dengan baik dan mudah dipahami serta jenis Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang disediakan memenuhi kebutuhan penerima layanan hukum.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan angka capaian sasaran program dan kegiatan yang telah direalisasikan pada Tahun 2021 untuk Biro Hukum dan Dumas, dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja. Pendekatan evaluasi dan analisis ini untuk mengukur seberapa besar tingkat capaian kinerja sasaran program dan kegiatan pada Tahun 2021. Hal ini dilakukan sebagai metode untuk mencermati kinerja yang telah dilakukan dengan cara membandingkan target dengan capaian/realisasi sebagai bahan untuk menilai kinerja suatu organisasi pada Biro Hukum dan Dumas.

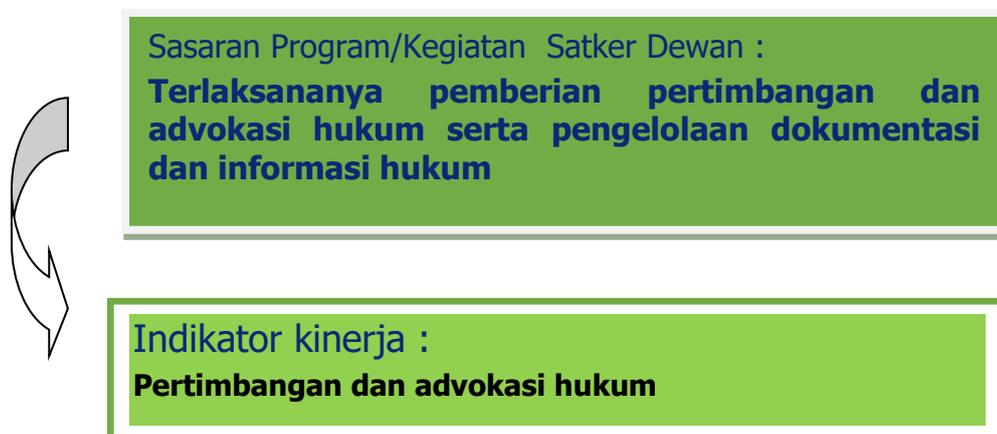
Sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen PK Tahun 2021, maka diperoleh evaluasi capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas sebagai berikut:

1. Dalam hal sasaran program terlaksananya perumusan dan evaluasi produk hukum Setjen DPR RI dapat dijabarkan capaian yang diperoleh oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Biro hukum memberikan pelayanan pembentukan produk hukum yang menghasilkan 25 (dua puluh lima) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - b. Biro hukum juga memberikan pelayanan evaluasi produk hukum yang sepanjang tahun 2021 telah menghasilkan 14 (empat belas) evaluasi produk hukum.
 - c. Telah disusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pembentukan Produk Hukum dalam 1 (satu) dokumen; dan
 - d. Telah disusun laporan Pertanggungjawaban Bagian Pembentukan Produk Hukum dalam 1 (satu) dokumen.
2. Pada **Satker Dewan** dengan sasaran program/*outcome* sebagai berikut :

Terlaksananya pemberian pertimbangan dan advokasi hukum serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Dengan satu indikator kinerja, yaitu Pertimbangan dan advokasi hukum.
3. Pada **Satker Setjen** dengan sasaran program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Terlaksananya perumusan dan evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan empat indikator kinerja, yaitu a.) Perumusan produk hukum; b.) Evaluasi produk hukum; c.) Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pembentukan Produk Hukum; d.) Laporan Pertanggungjawaban Bagian Pembentukan Produk Hukum.
 - b. Terlaksananya pemberian pertimbangan dan advokasi hukum serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Dengan 3 (tiga) indikator, yaitu a.) Pengembangan JDIIH; b.) Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum; c.) Laporan Pertanggungjawaban Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum.
 - c. Terlaksananya kegiatan analisis dan pengadministrasian surat pengaduan masyarakat dan permasalahan yang disampaikan ke DPR RI. Dengan 2 (dua) indikator yaitu a.) Layanan pengaduan masyarakat dan b.) Rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengaduan Masyarakat.

Untuk sasaran program dan kegiatan pada **Satker Dewan** dengan indikator kinerja dapat divisualisasikan dalam gambar sebagai berikut:

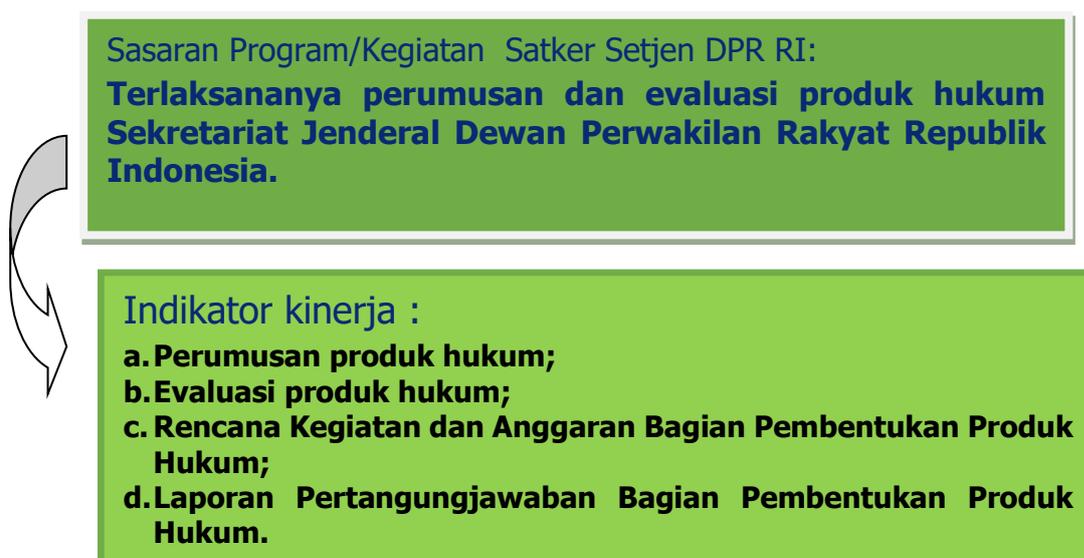
Gambar 3.1



Sasaran program dari IKU/IKP di atas adalah terlaksananya pemberian pertimbangan dan advokasi hukum serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Sasaran ini dicapai dengan indikator kinerja yaitu Pertimbangan dan advokasi hukum, dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen atau 100%, dengan rincian : telah dicapai 42 (empat puluh dua) dokumen untuk Surat Keputusan (SK) DPR RI, 206 (dua ratus enam) dokumen untuk SK Pimpinan DPR RI, 2275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) dokumen untuk SK Sekjen DPR RI, 19 (sembilan belas) dokumen untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 18 (delapan belas) kajian, 7 (tujuh) advokasi.

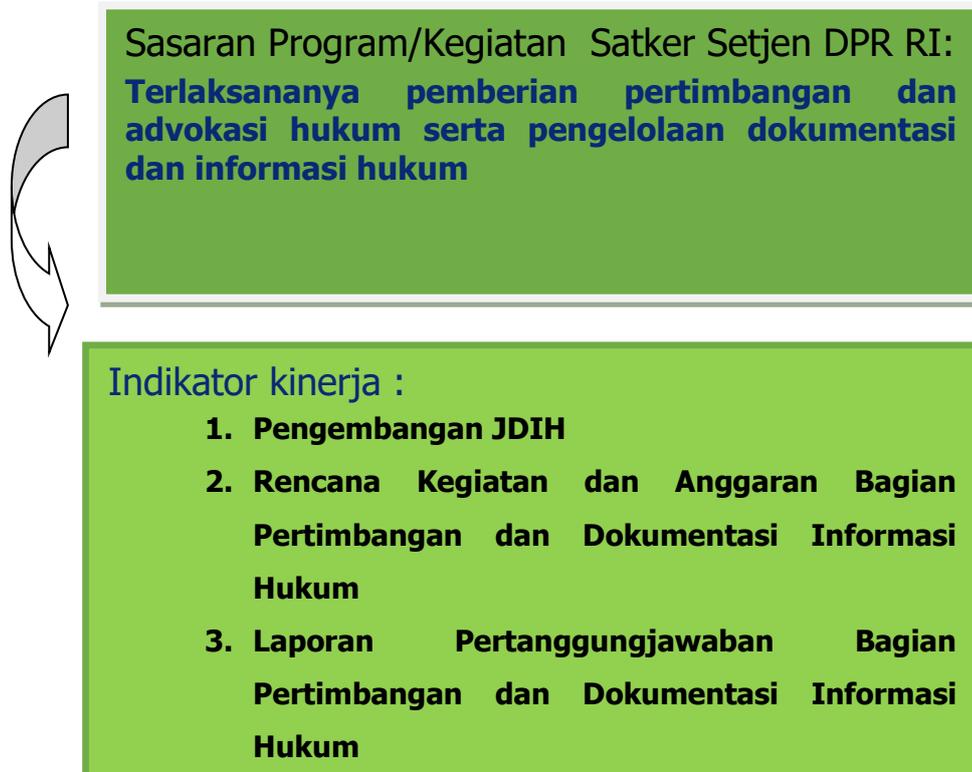
Selanjutnya untuk Satker Setjen, sasaran program/kegiatan dengan indikator kinerja digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2



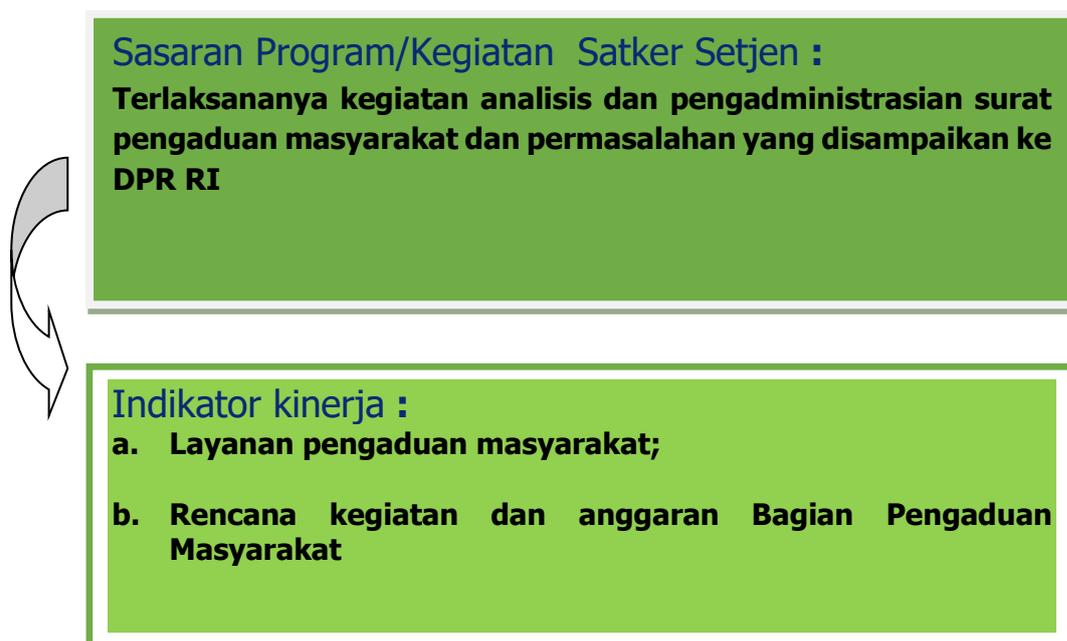
Pada **Satker Setjen**, dengan sasaran program **pertama** dari IKU/IKP ini adalah **“Terlaksananya perumusan dan evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”**. Sasaran ini dicapai dengan indikator kinerja yaitu perumusan produk hukum dengan target kinerja 1 layanan dan terealisasi 100%. Evaluasi produk hukum dengan target kinerja 1 layanan dan terealisasi 100%. Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pembentukan Produk Hukum dengan target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 100%. Untuk sasaran program pertama dengan indikator tersebut dapat tercapai secara optimal sesuai dengan target.

Gambar 3.3



Sasaran program dari IKU/IKP kedua Satker Setjen adalah **“Terlaksananya pemberian pertimbangan dan advokasi hukum serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum”**. Sasaran ini dicapai dengan indikator kinerja yaitu : Pengembangan JDIH, dengan target 1 (satu) dokumen; Rencana Kegiatan dan Anggaran Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, dengan target 3 (tiga) dokumen; Laporan pertanggung jawaban Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, dengan target 1 (satu) dokumen; Untuk sasaran program kedua dengan indikator tersebut dapat tercapai secara optimal sesuai dengan target.

Gambar 3.4



Dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2021 telah disebutkan bahwa kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat ditunjukkan dengan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sehingga output kinerja bagian ini adalah penanganan surat pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada DPR dan Setjen. Dalam Perjanjian Kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat, Layanan pengaduan masyarakat dengan target 2 (dua) layanan dan Rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengaduan Masyarakat dengan target 3 (tiga) dokumen. Kedua indikator tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target, yaitu 100% (seratus persen).

Penanganan surat pengaduan masyarakat dilakukan secara maksimal meskipun capaiannya tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja baik surat pengaduan masyarakat secara tertulis maupun online. Analisis surat pengaduan masyarakat yang diteruskan/disampaikan kepada DPR RI dan Setjen tahun 2021 sesuai dengan jumlah surat yang masuk sebanyak 5040 (lima ribu empat puluh) surat, terdiri atas surat pengaduan masyarakat secara tertulis 4440 (empat ribu empat ratus empat puluh) surat dan pengaduan masyarakat secara online 600 (enam ratus) surat, sedangkan surat kepada Setjen sebanyak 3 (tiga) surat. Analisis surat pengaduan masyarakat yang diteruskan/disampaikan kepada DPR RI tahun 2021 sebanyak 4053 surat atau 80,41% sedangkan surat kepada Setjen sebanyak 3 surat atau 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum dan Dumas meliputi Satker Dewan dan Satker Setjen. Berikut ini merupakan gambaran persandingan anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum dan Dumas Tahun 2020 – 2021 sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.3 berikut.

Diketahui terjadi penurunan alokasi anggaran pada awal tahun kegiatan untuk anggaran tahun 2021 pada satker Dewan, dibanding tahun 2020 yaitu pada satker Dewan untuk tahun 2020 sebesar 545.322.000,- dan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 522.422.000,- yaitu turun sebesar Rp. 22.900.000,- atau 4,19%.

Selain itu, alokasi anggaran untuk Satker Setjen pada awal tahun kegiatan untuk anggaran tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi kenaikan, dimana pada anggaran satker Setjen tahun 2020 sebesar Rp. 1,390,517,000,- dan pada tahun anggaran 2021 menjadi sebesar yaitu 2.763.180.000,-, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.372.663.000,- atau 98,71%.

Tabel. 3.3
Perbandingan Anggaran yang dikelola Biro Hukum dan Dumas
Tahun Anggaran (Dalam Rupiah) 2020 dan 2021

NO	Anggaran Biro Hukum dan Dumas	2020 (setelah revisi)	2021 (setelah revisi)	Selisih
		Rp.	Rp.	Rp.
1.	Satker Dewan	545.322.000,-	522.422.000,-	-22.900.000,-
2.	Satker Setjen	1,390,517,000,-	2.763.180.000,-	+1.372.663.000,-
	Jumlah	1.935,839.000,-	3.285.602.000,-	+1.349.763.000,-

Sumber : Biro Hukum dan Dumas, 2021

Untuk melihat capaian atau realisasi pengelolaan anggaran Biro Hukum dan Dumas pada Tahun Anggaran 2021, maka disampaikan perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran pada empat triwulan sebagaimana Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Pengelolaan Anggaran Satker Dewan
Selama Tahun Anggaran 2021

No	Biro Hukum dan Dumas	Satker Dewan		
		Pagu	Realisasi	%
1	Triwulan I	1.501.286.000,-	26.750.000,-	1,78
2	Triwulan II	1.501.286.000,-	450.000,-	0,03
3	Triwulan III	1.501.286.000,-	36.080.000,-	2,40
4	Triwulan IV	522.422.000,-	142.686.000,-	27,31
	Jumlah (revisi terakhir)	522.422.000,-	205.966.000,-	39,42

Sumber : Data Biro Hukum dan Dumas, 2021

Pada Satker Dewan Tahun 2021 dengan pagu sebesar Rp. 522.422.000,- telah terealisasi selama empat triwulan sebesar Rp. 205.966.000,- atau 39.42%

Tabel 3.5
Realisasi Pengelolaan Anggaran Satker Setjen
Selama Tahun Anggaran 2021

No	Biro Hukum dan Dumas	Satker Setjen		
		Pagu	Realisasi	%
1	Triwulan I	3.239.076.000,-	399.962.000,-	12,35
2	Triwulan II	3.239.076.000,-	574.387.200,-	17,73
3	Triwulan III	2.763.180.000,-	750.337.000,-	27,15
4	Triwulan IV	2.763.180.000,-	1.009.238.000,-	36,52
	Jumlah(revisi terakhir)	2.763.180.000,-	2.733.924.200,-	98,94

Sumber : Data Biro Hukum dan Dumas, 2021.

Sedangkan pada Satker Setjen Tahun 2021 dengan pagu sebesar Rp. 2.763.180.000,- telah dapat direalisasikan selama empat triwulan sebesar Rp. 2.733.924.200,- atau 98,94 %.

Berdasarkan data pagu anggaran dan realisasi anggaran tersebut di atas dapat diberikan penjelasan bahwa, rendahnya tingkat realisasi khususnya pada Satker Dewan Tahun 2021 dikarenakan kegiatan penanganan perkara perdata/tata usaha negara, rapat-rapat tim advokasi, perjalanan untuk kunjungan tim hukum disesuaikan dengan adanya jumlah perkara hukum yang

masuk dan ditangani. Perlu kami sampaikan bahwa penanganan perkara yang ditangani oleh Tim Kuasa Substitusi Hukum berada di wilayah DKI Jakarta (dalam kota). Disamping itu, penanganan perkara DPR ditangani oleh Tim Kuasa Substitusi baik dalam penyusunan dokumen perkara maupun untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan indeks anggaran yang dipertanggungjawabkan tetap menggunakan Standar Biaya Masukan. Sementara alokasi anggaran untuk antisipasi adanya perkara DPR menggunakan indeks satuan biaya yang diperuntukan bagi Anggota DPR RI.

Dalam praktek, tidak terjadi korelasi antara besaran pagu dan realisasi/penyerapan anggaran pada tingkat pencapaian kinerja program/kegiatan di Biro Hukum dan Dumas. Kondisi ini terjadi baik untuk Satker Dewan maupun untuk Satker Setjen, yang dapat dijelaskan bahwa Dewan sebagai lembaga politik, penyediaan pagu anggarannya dalam rangka antisipasi kegiatan dewan yang masih mungkin terjadi, sehingga bersifat antisipasi penyediaan anggaran. Contohnya penanganan pada perkara-perkara hukum DPR RI yang akan ditangani, walaupun tersedia anggarannya, namun belum tentu digunakan/direalisasikan apabila memang tidak ada perkara sebanyak yang diperkirakan/ditargetkan.

Sedangkan untuk Satker Setjen dengan tingkat penyerapan atau realisasi anggaran sebesar **2.733.924.200** atau **98,94%**, secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa penyerapannya sudah sangat baik dalam arti realisasi anggaran dapat dicapai dengan optimal. Adapun target kinerja tupoksi tetap sesuai target 100%. Kondisi ini juga menunjukkan, bahwa untuk Satker Setjen justru terjadi optimalisasi realisasi anggaran, dengan penyerapan 98,94%.

Selanjutnya capaian realisasi anggaran Tahun 2021 untuk ketiga Bagian di Biro Hukum dan Dumas, yaitu Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum dan Bagian Pengaduan Masyarakat sebagaimana tabel 3.6 dan 3.7 berikut ini.

Tabel 3.6
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021

A. Anggaran Biro

MAK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I S.D IV		KET
			REALISASI		
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Anggaran Biro		949.833.000	939.949.000	98,96	
5787. ABM.001	Kebijakan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	271.959.000	269.175.000	98,98	
051	Rapat Koordinasi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	261.904.000	259.120.000	98,94	
A					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Biaya materai)	1.000.000	1.000.000	100	
521211	Belanja Bahan (Kegiatan rapat)	28.204.000	28.140.000	99,77	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Peningkatan Kompetensi Analisis Hukum)	206.800.000	205.680.000	99,45	
522151	Belanja Jasa Profesi (Kegiatan mengundang pakar/narsumber)	25.900.000	24.300.000	93,82	
052	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP	10.055.000	10.055.000	100	
A					
521211	Belanja Bahan (Kegiatan rapat)	10.055.000	10.055.000	100	
5787. ABM.002	Kebijakan Peningkatan Kapasitas Analisis Kebijakan	53.403.000	53.403.000	100	
051	Diskusi/FGD/Seminar	53.403.000	53.403.000	100	
A Peningkatan Kapasitas Analisis Kebijakan					
522151	Belanja Jasa Profesi (Kegiatan mengundang pakar/narsumber)	2.700.000	2.700.000	100	

MAK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I S.D IV		KET
			REALISASI		
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (Biaya swab)	4.850.000	4.850.000	100	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	45.853.000	45.853.000	100	
5787. ABM.003	Kebijakan Pembangunan Zona Integritas	273.366.000	266.266.000	97,40	
051	Tim Kerja	273.366.000	266.266.000	97,40	
A					
521211	Belanja Bahan (Kegiatan rapat)	4.900.000	4.900.000	100	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (Biaya swab)	32.000.000	24.900.000	77,81	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Kegiatan paket meeting luar kota)	236.466.000	236.466.000	100	
5787. EAA.001	Operasional Penanganan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	351.105.000	351.105.000	100	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	351.105.000	351.105.000	100	
A					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Honorarium tenaga kontrak Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat)	351.105.000	351.105.000	100	

B. Bagian Pembentukan Produk Hukum

MAK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I S.D IV		KET
			REALISASI		
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5787. EAG.002	Perumusan Produk Hukum	776.114.000	771.076.000	99,35	

MAK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I S.D IV		KET
			REALISASI		
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Identifikasi dan Analisis Produk Hukum	81.450.000	79.850.000	98,03	
A					
521211	Belanja Bahan (Kegiatan rapat)	5.250.000	5.250.000	100	
521213	Honor Output Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi dan Analisis Produk Hukum Setjen DPR RI)	13.200.000	11.700.000	88,64	
522151	Belanja Jasa Profesi (Kegiatan mengundang pakar/narsumber)	63.000.000	62.900.000	99,84	
052	Pembahasan Produk Hukum	226.500.000	225.540.000	99,58	
A					
521211	Belanja Bahan (Kegiatan rapat)	94.500.000	94.440.000	99,94	
521213	Honor Output Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Pembahasan Produk Hukum Setjen DPR RI)	132.000.000	131.100.000	99,32	
053	Evaluasi Produk Hukum	46.160.000	46.160.000	100	
A					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Biaya materai)	1.910.000	1.910.000	100	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Biaya paket data dan komunikasi)	11.000.000	11.000.000	100	
521211	Belanja Bahan (Kegiatan rapat)	19.600.000	19.600.000	100	
521213	Honor Output Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Setjen DPR RI)	13.650.000	13.650.000	100	

MAK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I S.D IV		KET
			REALISASI		
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
054	Sosialisasi Produk Hukum	422.004.000	419.526.000	99,41	
A					
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (Biaya swab)	31.200.000	31.125.000	99,76	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Kegiatan paket meeting dalam kota)	36.564.000	36.564.000	100	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Kegiatan paket meeting luar kota)	354.240.000	351.837.000	99,32	

Sumber : Bagian Pembentukan Produk Hukum, Desember 2021

C. Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum

MAK	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I S.D IV		KET
			REALISASI		
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SATKER DEWAN					
5801. BCB.002	Perkara Hukum Baik di Dalam maupun di Luar Pengadilan Oleh Tim Kuasa DPR RI				
051	Penanganan Perkara Hukum dan Litigasi DPR RI	522.422.000	205.966.000	39,42	
A	Kegiatan rapat-rapat	129.840.000	38.130.000	29,37	
521211	Belanja Bahan (Kegiatan rapat)	25.440.000	8.730.000	34,32	
522151	Belanja Jasa Profesi (Kegiatan mengundang pakar/narsumber)	75.600.000	24.000.000	31,75	
522191	Belanja Jasa Lainnya (Kegiatan saksi/ahli dan beracara)	28.800.000	5.400.000	18,75	

MAK	PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I S.D IV		KET
			REALISASI		
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Kegiatan Tim Kuasa DPR RI.	133.000.000	87.200.000	65,56	
521213	Honor Output Kegiatan (Honorarium Tim Kuasa Hukum DPR RI dan Kuasa Substitusi DPR RI)	133.000.000	87.200.000	65,56	
C	Perjalanan Dinas	259.582.000	80.636.000	31,06	
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19 (Biaya swab dalam rangka perjalanan dinas)	37.650.000	1.925.000	5,11	
524111	Belanja Perjalanan Biasa (Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka persidangan perkara)	70.818.000	43.988.000	62,11	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport lokal dalam rangka persidangan perkara)	10.500.000	5.850.000	55,71	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Kegiatan paket meeting dalam kota)	51.682.000	0	0	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Kegiatan paket meeting luar kota)	88.932.000	28.873.000	32,47	

SATKER SETJEN					
Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum		422.788.000	409.985.000	99,40	
5787. EAG.001	Pemberian Pertimbangan Hukum dan Advokasi Hukum	92.465.000	90.955.000	98,37	
051	Mitigasi Perkara Hukum	92.465.000	90.955.000	98,37	
A					
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (Biaya Administrasi Persidangan)	70.000	0	0	
521211	Belanja Bahan (Kegiatan rapat)	16.170.000	16.170.000	100	
522151	Belanja Jasa Profesi (Kegiatan mengundang pakar/narsumber)	8.800.000	8.100.000	92,04	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (Biaya swab)	2.000.000	1.650.000	82,5	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Kegiatan paket meeting luar kota)	65.425.000	65.035.000	99,40	
5787. EAG.003	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	330.323.000	319.030.000	96,58	
051	Pengembangan Website	311.823.000	300.530.000	96,38	
A	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Biaya materai)	2.100.000	2.100.000	100	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Biaya paket data dan komunikasi)	9.000.000	9.000.000	100	
521211	Belanja Bahan (Kegiatan rapat)	29.900.000	29.832.000	99,77	
521213	Honor Output Kegiatan (Tim pengembangan website dan clustering peraturan perundang-undangan)	73.350.000	73.350.000	100	

522151	Belanja Jasa Profesi (Kegiatan mengundang pakar/narsumber dan moderator)	32.600.000	30.600.000	93,86	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (Biaya swab)	21.400.000	12.830.000	59,95	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya (Fumigasi dan Perawatan bahan/Dokumentasi Hukum)	9.636.000	9.636.000	100	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport lokal)	3.150.000	3.150.000	100	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Kegiatan paket meeting dalam kota)	88.596.000	88.596.000	100	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Kegiatan paket meeting luar kota)	42.091.000	41.436.000	98,44	
052	Evaluasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	18.500.000	18.500.000	100	
A					
521213	Honor Output Kegiatan (Tim Evaluasi JDIH)	18.500.000	18.500.000	100	

Sumber : Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, Desember 2021

D. Bagian Pengaduan Masyarakat

MAK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I S.D IV		KET
			REALISASI		
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5787. EAG.004	Layanan Pengaduan Masyarakat	614.445.000	612.914.200	99,75	
051	Penanganan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	191.725.000	190.950.000	99,59	
A					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.640.000	2.500.000	94,70	

MAK	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN I S.D IV		KET
			REALISASI		
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Biaya materai)				
521211	Belanja Bahan (Kegiatan rapat)	70.985.000	70.450.000	99,25	
521213	Honor Output Kegiatan (Tim Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Surat, Website dan SMS)	78.100.000	78.100.000	100	
522151	Belanja Jasa Profesi (Kegiatan mengundang pakar/narsumber)	40.000.000	39.900.000	99,75	
052	Pengembangan layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	422.720.000	421.964.200	99,82	
A					
521211	Belanja Bahan (Kegiatan rapat)	12.600.000	12.600.000	100	
521213	Honor Output Kegiatan (Tim Perubahan Layanan Short Masage Service (SMS) Aspirasi Menjadi WhatspApp (WA))	57.200.000	57.200.000	100	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (Biaya swab)	22.900.000	22.896.000	99,98	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	288.692.000	287.940.200	99,74	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Kegiatan paket meeting luar kota)	41.328.000	41.328.000	100	

Sumber : Bagian Pengaduan Masyarakat, Desember 2021

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan dalam waktu satu tahun oleh Biro Hukum dan Dumas sebagai salah satu unit kerja pimpinan tinggi pratama Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam melaksanakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.

Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI sebagai salah satu instansi pemerintah yang telah berupaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik sehingga dapat berperan penting dalam mendukung kinerja Setjen DPR RI untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi dan keahlian.

Berdasarkan uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Hukum dan Dumas tahun 2021, menunjukkan bahwa seluruh target pada indikator kinerja dapat tercapai. Tingkat capaian kinerja program/kegiatan untuk Satker Dewan dengan satu indikator, apabila secara persentase dijumlahkan seluruhnya, maka akan didapat nilai rata-rata 100 % atau sangat baik. Kondisi ini dapat dijelaskan karena dari indikator tersebut yakni jumlah kegiatan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum dicapai 1 dokumen dari jumlah target yang direncanakan 1 dokumen atau 100%. Sedangkan dari segi realisasi anggarannya Satker Dewan Tahun 2021 sebesar Rp. 205.966.000 atau 39,42%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan untuk Satker Setjen, dengan 3 (tiga) sasaran atau program dan diukur dengan 9 (Sembilan) indikator. Apabila secara persentase dijumlahkan seluruhnya dan dibagi 9 (Sembilan) indikator, maka didapat nilai yang baik. Meski demikian dalam hal penanganan surat pengaduan masyarakat realisasinya masih tergantung tindak lanjut oleh Pimpinan/AKD DPR RI dan sistem aplikasi yang belum efektif.

Selanjutnya realisasi anggaran untuk Satker Setjen Tahun 2021 adalah sebesar Rp. **2.733.924.200,-** atau **98,94%** dari DIPA Tahun 2021 sebesar **2.763.180.000,-**. Realisasi anggaran yang sangat baik ini tidak terlepas dari adanya kondisi pandemi *covid-19* yang mengharuskan Pemerintah melakukan pemotongan postur APBN baik - Anggaran Dewan maupun anggaran Setjen untuk menanggulangi dampak dari adanya pandemi *covid 19* yang masih

berlangsung sampai saat ini, sehingga menyebabkan anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum dan Dumas mengalami beberapa kali revisi, yang berakibat pada makin mengecilnya jumlah alokasi anggaran yang dikelola oleh Biro Hukum dan Dumas.

Selanjutnya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Biro Hukum dan Dumas untuk memperbaiki kinerja Tahun 2021 dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi yang intensif baik internal para pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Dumas maupun eksternal antara Biro Hukum dan Dumas dengan *stakeholder*.
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama antar unit kerja di lingkungan Biro Hukum dan Dumas dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
3. Melaksanakan sosialisasi layanan Biro Hukum dan Dumas kepada Pegawai baik ASN maupun Non-ASN secara berkala agar dapat memberikan pelayanan prima.
4. Memaksimalkan peluang koordinasi dan kerjasama dengan berbagai kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Dumas.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran secara efisien dan efektif melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai, serta dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak/para pemangku kepentingan.
6. Meningkatkan pembinaan SDM pegawai, baik kualitas maupun kompetensi, juga memperhatikan jumlah agar sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang tugas dan fungsi unit kerja-unit kerja di lingkungan Biro Hukum dan Dumas.
7. Mengoptimalkan kinerja kegiatan dengan memperhatikan penyerapan anggaran – sesuai rencana yang ditetapkan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
8. Perlunya perbaikan dan penambahan fitur Aplikasi Pengaduan Masyarakat.
9. Perlunya mempercepat dan mengoptimalisasikan pengembangan sistem JDIIH Setjen DPR RI (*jdih.dpr.go.id*)-khususnya website JDIIH Setjen DPR RI yang saat ini telah terintegrasi dengan JDIIH Nasional dengan menampilkan inovasi berupa fitur atau menu baru yang dapat memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan layanan informasi dan dokumentasi hukum melalui Website JDIIH Setjen DPR RI yang lebih cepat, efisien dan efektif.
10. Prestasi yang telah dicapai antara lain dalam bidang penyelenggaraan kearsipan dan sebagai anggota JDIIHN perlu dipertahankan dan ditingkatkan.